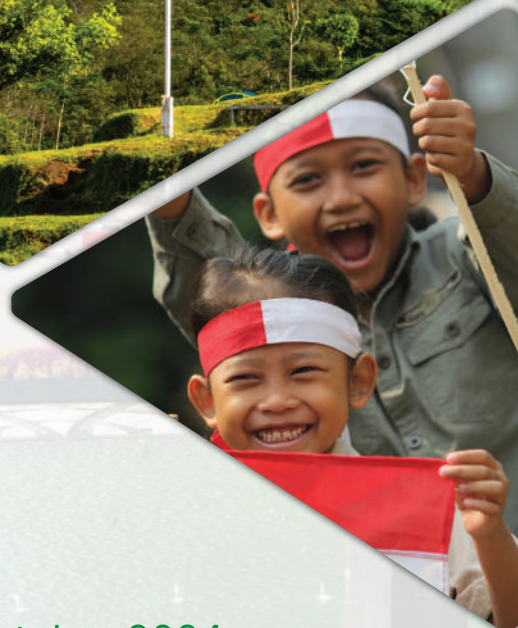




KOMITE DAERAH EKONOMI KEUANGAN SYARIAH





INSIGHT ▪ Edisi Ke-16 ▪ Oktober 2024

2 Kata Sambutan

3 Laporan Utama

KNEKS Perkuat Sinergi dengan Pemda
Wujudkan Ekonomi Maju dan Adil

WAWANCARA

7 Kemendagri Dorong Percepatan Pembentukan KDEKS

Dr. Bahri S.STP, M.Si

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah
Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

9 Peran Strategis Bappenas Menye- laraskan Visi dan Implementasi Ekonomi Syariah

**Amalia Adininggar Widyasanti, S.T,
M.Si, M.Eng, Ph.D**

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas

11 Penguatan Legalitas Pembentukan KDEKS Sebuah Keniscayaan

Dr. Roberia, SH, MH

Direktur Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum
dan HAM

13 Eksistensi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi

H. Ahmad Wira, M.Si, M.Ag, Ph. D

Direktur Eksekutif KDEKS Sumatra Barat

16 Sambut Potensi Besar Ekonomi Syariah di Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Muhaimin, S.H, M.Hum

Direktur Eksekutif KDEKS NTB

19 Saatnya Membumikan Gaya Hidup Halal

Mohammad Ghofirin

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah
KDEKS Jawa Timur

23 OPINI

KDEKS sebagai Katalisator
Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan
Syariah di Indonesia

Afidah Nur Aslamah

Mahasiswa Magister Ekonomi dan Keuangan
Syariah Universitas Indonesia, Program
Associate Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

26 Highlight Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

30 Beberapa Tonggak Sejarah dan Kebijakan Penting Sebagai Komitmen Indonesia Mengem- bangkan Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.

32 Dokumentasi Rapat Pleno KDEKS

Kata Sambutan

KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

DIREKTUR EKSEKUTIF KNEKS



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita kembali dipertemukan dalam edisi ke-16 buletin insight Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pada edisi kali ini, kita mengangkat tema yang sangat penting dan relevan, yaitu: "Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Provinsi."

Tema ini hadir di tengah semangat bersama untuk memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Pembentukan KDEKS menjadi salah satu langkah strategis yang diinisiasi melalui 13 Program Prioritas, sebagaimana ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS pada Rapat Pleno KNEKS, 30 November 2021.

KDEKS memiliki peran krusial sebagai katalisator pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah, dengan dasar hukum yang kuat melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Keberadaan KDEKS diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang efektif, menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan potensi lokal. Hal ini mencakup sektor-sektor unggulan seperti industri halal, wakaf produktif, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah.

Manfaat dari keberadaan KDEKS tidak hanya terbatas pada penciptaan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, KDEKS berpotensi meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperluas akses keuangan syariah. Semua ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Kami berharap edisi buletin Insight ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi semua pihak untuk terus mendukung pengembangan KDEKS di seluruh provinsi. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KNEKS Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Wujudkan Indonesia Maju dan Adil

Ekonomi Syariah memiliki potensi besar di tingkat global maupun di Indonesia untuk berkembang. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia tidak saja menjadi salah satu pasar halal terbesar di dunia namun lebih dari itu juga berpotensi menjadi produsen halal global.

Ekonomi syariah hadir dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Hal ini juga sesuai dengan budaya dan kearifan lokal pada diri masyarakat Indonesia yang kaya dengan nilai religius, gotong royong, berkeadilan sebagai pondasi kuat bagi pengembangan ekonomi syariah.

Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global. Potensi ini bisa dimaksimalkan melalui edukasi, regulasi yang mendukung dan inovasi produk keuangan syariah yang relevan.

Selain itu, generasi muda Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak utama ekonomi Syariah. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap inovasi teknologi keuangan berbasis syariah, seperti fintech syariah dan blockchain halal.

Beroperasinya ekonomi syariah di Indonesia diyakini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Alasannya, ekonomi syariah menekankan keadilan sosial, dimana transaksi dan investasi harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil.

Pemberlakuan ekonomi syariah di Indonesia dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat umum melalui instrumen-instrumennya seperti zakat, sedekah, wakaf, serta kegiatan ekonomi dan keuangan yang berbasis kerjasama, yang tidak hanya berbagi dalam keuntungan namun juga dalam risiko secara proposional. Ekonomi syariah memberikan mekanisme redistribusi kekayaan yang adil, yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Peran strategis ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional tersebut, kini semakin menguat. Pemerintah dalam empat tahun terakhir ini terus menata berbagai kebijakan strategis yang menyinergikan pelaksanaan ekonomi nasional dengan ekonomi syariah.

Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berbagai program juga telah dilaksanakan utamanya mendorong pemerintah daerah agar berperan lebih aktif dalam mengembangkan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Beberapa program yang terus dikembangkan tersebut seperti menggerakkan Industri Halal Indonesia yang memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri halal dunia. Ekonomi syariah mendukung pengembangan sektor-sektor seperti makanan halal, fesyen, farmasi, kosmetik, dan pariwisata halal. Penguatan industri halal dipastikan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Hal strategis lainnya yakni dengan mendorong Inklusi Keuangan Ekonomi syariah dapat membantu memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat yang enggan menggunakan layanan keuangan konvensional. Hal ini akan memperluas akses masyarakat, terutama di pedesaan, terhadap produk keuangan yang adil dan sesuai syariah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan terkait ekonomi syariah untuk dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem ekonomi syariah. Hal ini dapat menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar ekonomi global berbasis syariah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rapat Pleno KNEKS pada 4 Oktober 2024 di Jakarta mengingatkan bahwa meskipun ekonomi syariah memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi ketika bersaing dengan pelaku ekonomi lain.

Selain masih banyaknya masyarakat yang belum memahami konsep dan keuntungan ekonomi syariah, literasi keuangan syariah yang belum optimal membuat sebagian besar masyarakat tetap memilih produk dan layanan ekonomi lainnya yang lebih dikenal.

Ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah misal, meskipun sudah berkembang masih butuh ditingkatkan lagi. Untuk itu bank dan lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam menyediakan berbagai produk yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti fintech syariah atau investasi berbasis syariah yang menarik bagi berbagai kalangan.

Wapres menegaskan bahwa regulasi dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah sudah ada namun masih diperlukan regulasi yang lebih matang dan dukungan kebijakan yang konsisten agar ekonomi syariah dapat tumbuh lebih cepat.

Selain itu, globalisasi ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi syariah. Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tajam, Wapres Ma'ruf Amin di hadapan 31 perwakilan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang hadir dalam rapat pleno KNEKS mengajak semua pihak untuk terus optimistis bahwa Indonesia akan menjadi pemain utama dalam perekonomian syariah di tingkat nasional maupun global. Hal itu bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir, meski fluktuatif, Indonesia telah menghasilkan perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah secara positif.

Guna pengembangan implementasi ekonomi dan keuangan syariah lebih lanjut, menurut Wapres Ma'ruf, perlu ada perbincangan dan kemauan politik yang kuat agar di setiap daerah dapat membangun ekonominya maupun berinvestasi secara syariah yang disinergikan dengan RPJPN 2024-2025.

Dari sini daerah bisa memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari transformasi kontribusi dan kegiatan ekonominya.

“Pembangunan di daerah harus selaras dengan rencana pembangunan nasional 2025 - 2029 sebagai panggung strategis bagi seluruh pemerintahan untuk menyatukan dan memadukan langkah pembangunan ekonomi dan keuangan syariah nasional,” tegasnya

Menurut Wapres fondasi transformasi ekonomi dan keuangan syariah ke depan dibutuhkan untuk mencapai kreativitas ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan pemerataan sosial. Untuk itu momentum Rapat Pleno KNEKS kali ini selain sebagai evaluasi kinerja 5 tahun juga sebagai rekomendasi perbaikan dan menunjukkan visi-visi arah dan program strategis untuk mengoptimalisasi pencapaian ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air di masa yang akan datang .



GENJOT INSTRUMEN SYARIAH



Kabar gembira dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pemerintah akan konsisten dan serius dalam mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia. Hal itu bisa ditandai dengan telah bertumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air yang bisa di-review dari tahun 2020 hingga 2024 yang positif meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19.

Selama periode tersebut, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi secara global, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, sektor keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Indeks saham syariah tercatat mengalami pertumbuhan positif di beberapa sektor seperti perbankan syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah. Pangsa pasar keuangan syariah pada akhir 2020 mencapai sekitar 6,5% dari total aset perbankan nasional.

Memasuki tahun 2021, ekonomi syariah Indonesia tumbuh lebih stabil meskipun masih dalam masa pemulihan dari pandemi. Pemerintah terus menggalakkan program pemulihan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor syariah. Hal itu juga ditandai adanya pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2021, tumbuh sekitar 13-15% dengan total aset mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Pemerintah meningkatkan dukungannya untuk pengembangan ekonomi syariah, dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Syariah mengalami peningkatan signifikan yang bisa terlihat di sektor industri halal, pariwisata syariah, dan perbankan syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah diperkirakan mencapai 14-16%. Menurut laporan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan syariah terus mengalami ekspansi, terutama di sektor fintech dan obligasi syariah (sukuk). Arah kebijakan pemerintah juga terlihat terus memprioritaskan integrasi sistem ekonomi syariah dengan sektor-sektor utama lainnya.

Hingga pada tahun 2023 pangsa pasar keuangan syariah terus naik, mendekati 10% dari total aset perbankan nasional. Yang lebih menggembirakan perkembangan ekosistem halal ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada perbankan, tetapi juga berkembang di sektor lain seperti makanan halal, kosmetik halal, dan fashion syariah.

Diperkirakan ekonomi syariah akan terus tumbuh, terutama dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk syariah. Sehingga pada tahun 2024 ini, pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia akan terus berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan regulasi yang mendukung sektor syariah.

Digitalisasi keuangan syariah di sektor fintech diprediksi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan keuangan syariah di tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, sektor keuangan dan ekonomi syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, didorong oleh dukungan kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan inovasi teknologi.

Di hadapan peserta Rapat Pleno KNEKS dan Sinergi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus dan perlu untuk mengembangkan produk, instrumen, dan perluasan akses pasar syariah. Sedangkan dari sisi inklusivitas perlu dilakukan penggunaan teknologi digital dan branceless banking untuk memperluas keterjangkauan pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Pemerintah imbuhan Menkeu Sri Mulyani juga akan terus mengarahkan mobilisasi keuangan syariah dalam pendanaan terutama pemerintah daerah, di dalam membangun proyek-proyek yang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga di dalam pencapaian sistem perekonomian nasional. "Saya berharap kita akan terus meningkatkan kemampuan di bidang instrumen syariah dan pembiayaan investasi," ujarnya.



Pemerintah, ujar, Menkeu Sri Mulyani juga akan terus mengarahkan mobilisasi keuangan syariah dalam pendanaan terutama pemerintah daerah, di dalam membangun proyek-proyek yang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga di dalam pencapaian sistem perekonomian nasional.

“**Saya berharap kita akan terus meningkatkan kemampuan di bidang instrumen syariah dan pembiayaan investasi, ujarnya.**”



PERAN DAERAH

Pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah ke depan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan peranan pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Diakui oleh Menkeu Sri Mulyani praktik ekonomi konvensional yang terjadi saat ini masih berbiaya tinggi. Pembangunan dari mulai rumah sakit, pasar, instalasi air, transportasi perkotaan, dan tempat pengelolaan sampah dikenakan bunga yang masih sangat besar. Sehingga peluang untuk memasukan instrumen investasi syariah dalam proses pembangunan di daerah berpeluang besar. “Saya berharap KNEKS dan KDEKS untuk bersama-sama menekuni area instrumen pembiayaan yang masih sangat bisa kita naikkan,” imbuhnya.

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, salah satu sumber finansial syariah bisa diperoleh dengan mengembangkan peranan Islamic Development Bank (IsDB) dalam menarik dana global. Menkeu menyebut negara-negara di Timur Tengah memiliki likuiditas dan membutuhkan tempat untuk menempatkan dana investasi yang kompetitif. “Islamic Development Bank dalam hal ini kita sebagai *Stakeholder* ketiga akan kita dorong untuk terus mengembangkan ekosistem keuangan syariah juga di Indonesia. Saya berharap dalam hal ini Kementerian Keuangan, KNEKS, dan seluruh Kementerian Pembiayaan akan terus meningkatkan upaya untuk membangun planet finance yang tangguh dan bisa kompetitif,” katanya.

Pengelolaan dana sosial juga masih berpotensi untuk dikembangkan. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan keuangan dana sosial syariah yang selama beberapa periode mengalami kenaikan. Kemenkeu mencatat dana sosial pada tahun 2023 telah mencapai Rp32,2 triliun untuk zakat, infaq, dan sedekah.

KNEKS memiliki tanggung jawab besar untuk mengendali potensi dana sosial syariah tersebut dan mencari kerja sama strategis untuk mengelola dana sosial internasional serta menarik potensi dana filantropis luar negeri, terutama di kawasan Timur Tengah. Kebebasan untuk membentuk lembaga pengembangan dan akselerasi warga perlu dikaji agar dapat mendukung pengembangan produktivitas aset warga secara profesional. Hal ini menurut Menkeu juga sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk terus mengembangkan dan mengelola aset-aset negara.

Pemerintah juga menyadari dalam membangun ekonomi syariah juga harus melakukan penguatan infrastruktur ekosistem baik dari sisi SDM-nya, regulasinya, kelembagaan, digitalisasi, literasi dan inklusinya. “Kita perlu terus meningkatkan ekonomi syariah di semua front dan oleh karena itu bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, LPS dan lembaga-lembaga lainnya,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani juga melihat perlu memperkuat inklusifitas keuangan syariah terutama bagi kelompok marginal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang masih relatif terbatas di dalam mengakses layanan produk keuangan syariah. Pemajuan pemahaman ekonomi syariah nasional tentu tidak terlepas dari peran kepala-kepala daerah yang dapat menggerakkan perkembangan dan potensi ekonomi daerah masing-masing. “Kita berharap sinergi agar KNEKS dan KDEKS lebih kuat untuk meningkatkan pengembangan ekosistem perekonomian syariah,” pungkas Sri Mulyani.

Selaras dengan tujuan utama syariah, ekonomi syariah harus berorientasi pada aspek kemaslahatan. Setiap pembahasan pengembangan ekonomi syariah harus dirancang sesuai kebutuhan dan kesediaan masyarakat.

Menkeu yakin, melalui strategi yang tepat, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan di dalam mencapai cita-cita Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan berkeadilan.



Kemendagri Dorong Percepatan Pembentukan KDEKS

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, **Dr. Bahri, S.STP, M.Si**

KEBERADAAN Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dirasakan sangat strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan akan terus mendorong percepatan KDEKS melalui berbagai regulasi dan kebijakan keuangan yang salah satunya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Daerah (APBD) Tahun 2024.

Dukungan regulasi terkait anggaran daerah untuk pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah juga menjadi payung hukum pembentukan dan alokasi anggaran untuk KDEKS. Melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tersebut juga dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Komite ini akan membantu pelaku ekonomi dan lembaga finansial syariah yang terus bertumbuh di Tanah Air.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Kemendagri Bahri saat ditemui Insight menyampaikan pemerintah (pusat) sangat mendukung berbagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi syariah di setiap daerah dan hal tersebut merupakan amanah undang-undang.

Di dalam lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 itu disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Daerah untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah, antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hal lain yang tertuang dalam Permendagri tersebut yakni pemerintah dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bahri memastikan Kemendagri akan terus mengarahkan Pemerintah Daerah setiap tahunnya terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui KDEKS. Seperti yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.

“Setiap tahun kita akan arahkan pembentukan KDEKS. Di tahun 2025 kita juga terus memantau bahkan di suatu daerah yang mayoritas penduduknya non muslim juga menyatakan ingin membentuk KDEKS. Kita bisa menyatakan atau mengarahkan mandatori itu karena undang-undang mengamanatkan,” kata Bahri, Senin (29/7/2024) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

“Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bahri.



Potensi pengembangan ekonomi nasional melalui ekonomi syariah sangat besar. Hal ini karena potensi Indonesia menjadi hub ekonomi syariah dengan daya dukung penduduknya yang mayoritas muslim akan memudahkan dalam pengembangannya. Apalagi permintaan global terhadap produk halal juga terus bertambah. Diharapkan ke depan Indonesia tidak saja menjadi pasar produk halal namun bisa menjadi pemain utama sebagai produsen produk halal serta terdepan pada industri finansial Syariah.

Mengutip laporan platform e-commerce Alibaba.com yang merilis laporan industri halal 2023, mencakup analisa tentang tren konsumsi global dan perkembangan produk halal dalam pasar e-commerce. Indonesia dinilai memiliki keunggulan di pasar produk halal.

Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di dunia sekaligus pemuncak klasemen di wilayah Asia Tenggara. Adapun negara-negara yang menempati peringkat satu sampai enam yakni: Amerika Serikat, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Inggris, dan Arab Saudi.

Indonesia juga diakui sebagai salah satu pemasok utama produk halal. Pemerintah telah berkomitmen untuk memajukan sektor halal sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan.

Keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) misal yang saat ini sedang aktif berupaya mengembangkan sektor industri halal di Indonesia. HIPS menyiapkan kawasan yang memudahkan masyarakat dalam mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, mereka juga sedang mengajukan permohonan untuk mendapatkan status Kawasan Ekonomi Khusus Halal yang akan memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha di dalamnya. Dengan adanya investasi akan membawa dampak positif dengan mendorong kemajuan di berbagai sektor ekonomi sebagai imbalan atas investasi yang telah dilakukan.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa sektor halal value chain (HVC) di Indonesia akan tumbuh 4,5-5,3 persen tahun ini. Meliputi sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim. Angka ini diestimasikan mampu menyumbang lebih dari 25 persen perekonomian negara.

Selain itu, terbentuknya 3 Kawasan Industri Halal (KIH) di provinsi Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau menjadi salah satu pondasi penting untuk menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub. Data Kementerian Perdagangan mencatatkan, total ekspor produk halal pada 2022 yang tercatat mencapai USD 15,87 miliar.

Perkembangan positif tersebut perlu terus ditingkatkan agar implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat meyumbang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia.





Peran Strategis Bappenas Menyelaraskan Visi dan Implementasi Ekonomi Syariah

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, **Amalia Adininggar Widyasanti, S.T, M.Si, M.Eng, Ph.D**

EKONOMI dan keuangan syariah global memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu didorong oleh populasi muslim yang terus bertumbuh, meningkatnya kesadaran tentang produk halal, serta perkembangan inovasi di sektor keuangan syariah.

Saat ini terdapat hampir 2 miliar muslim di seluruh dunia, yang merupakan sekitar 24% dari populasi global. Permintaan untuk produk dan layanan berbasis syariah, mulai dari keuangan, makanan halal, hingga pariwisata halal, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi muslim, khususnya di negara-negara dengan mayoritas muslim seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika.

Menurut catatan pada tahun 2023, pengeluaran konsumen muslim global mencapai US\$2,29 triliun dan Indonesia sangat berpotensi mengambil manfaatnya. Indonesia sendiri memiliki populasi muslim terbesar di dunia, menjadikannya pasar potensial utama untuk ekonomi syariah.

Namun, dibandingkan dengan negara lain seperti di Timur Tengah, Indonesia masih tertinggal dalam membangun dan mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah. Meskipun, sejak 1990-an pemerintah telah aktif memperkenalkan konsep-konsep ekonomi dan keuangan syariah ke masyarakat dan upaya melembagakan instrumen-instrumennya, termasuk pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 10 Februari 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden.

Walaupun memiliki potensi besar, daya saing Indonesia di pasar global dinilai masih perlu ditingkatkan. Misalnya, sektor industri halal masih harus meningkatkan standar mutu dan sertifikasi agar bisa lebih kompetitif di pasar internasional.

Hal lain menurut Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti pada pertemuan Rapat Pleno KNEKS dan Sinergi Pengembangan Ekonomi Syariah di Jakarta awal Oktober tahun ini bahwa pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung keuangan syariah harus terus diperkuat agar Indonesia dapat lebih berperan dalam peta ekonomi syariah global.

Tidak ada kata terlambat bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memperkuat posisi perekonomian syariahnya di kancah global. Hal tersebut bertepatan dengan target pemerintah yang hendak memacu pertumbuhan ekonominya di angka 8 persen tiap tahun dalam lima tahun mendatang.

Implementasi penguatan ekonomi nasional yang representasi di daerah secara beragam selama ini dinilai kurang menguntungkan. Bahkan menurut Amalia untuk mengembangkan perekonomian nasional, termasuk ekonomi dan keuangan Syariah perlu sinkronisasi yang kuat dengan pemerintah daerah.

Momentum akselerasi penguatan perekonomian syariah dinilai tahun depan cukup bagus. Hal ini mengingat perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mulai tahun depan dilakukan serentak setelah pelaksanaan pilkada serentak. Yang lebih menggembirakan RPJMD pun perodesasinya sama dengan perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) imbu Amalia yang saat ini menjabat wakil menteri Bidang Perekonomian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengajak pemerintah daerah memanfaatkan secara Bersama-sama dalam mengatur, menyelaraskan gerak langkah untuk membangun ekonomi syariah secara serentak.

Karena itulah ditegaskan Amelia pihak Bappenas juga akan mengawal RPJMN agar dituangkan dalam RPJMD dalam 5 tahun ke depan karena hal ini juga merupakan aspirasi dan keinginan Presiden.

Diakui besarnya potensi ekonomi Syariah juga belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pencapaian perekonomiannya lebih baik.

“Saya menggarisbawahi kembali bahwa pengelolaan ekonomi syariah nasional perlu dilakukan bersama karena Indonesia sebenarnya punya potensi yang luar biasa,” imbuhnya.

Belum dimanfaatkannya potensi tersebut secara optimal bisa dilihat dari suplai Indonesia ke pasar global. Ini Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim yang besar ternyata belum mampu menjadi top leader global di dalam pasar global halal atau pasar global muslim. Mengutip global Islamic economic index Indonesia berada di nomor tiga.

Bahkan sebagai eksportir halal, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara China, Korea, dan negara-negara muslim lainnya.

“Padahal Indonesia kalau dengan karakteristik sebagai negara muslim, seharusnya bisa memanfaatkan ekspor pasar halal global dan akan lebih dipercaya oleh para muslim global dibandingkan mereka mengimpor dari negara-negara yang bukan muslim,” ujar Amalia.

Beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran dan UAE tercatat sudah menjadi top leader dalam pasar keuangan syariah global, termasuk Malaysia yang juga mendominasi beberapa sektor keuangan syariah. Hal lain yang perlu digarap pemerintah daerah yakni dana sosial syariah yang potensinya sangat besar. Hingga saat ini, menurut Bappenas realisasinya masih sangat kecil dibandingkan dengan potensinya.

Upaya pemerintah di dalam mendorong implementasi ekonomi Syariah tersebut juga sudah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 59 tahun 2024. Di situ, menurut Amalia RPJPN diterjemahkannya ke dalam RPJPN 5 tahun ke depan yang sekaligus adalah menerjemahkan Asta Cita Nomor 2 yang di dalamnya ada ekonomi syariah. *“Jadi di dalam RPJPN itu ada 5 strategi nasional untuk mendorong ekonomi syariah dalam 5 tahun ke depan,”* ujarnya.

Yang juga menjadi catatan Bappenas menurut Amalia yakni keberadaan dana sosial ini di dalam SDG seperti itu sebenarnya itu bisa menjadi sumber baru pendanaan pembangunan (sources of development fund) jika pengumpulan dan penyalurannya bisa dilakukan dengan efisien, dan efektif bagi pembangunan masyarakat.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia harus terus meningkatkan daya saing produk halal dan memperkuat ekosistem keuangan syariahnya agar dapat bersaing di pasar global dan menjadi pusat ekonomi syariah terdepan di dunia.

Untuk itu Bappenas dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang mencakup pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi nasional memastikan bahwa ekonomi syariah menjadi bagian dari prioritas pembangunan ekonomi inklusif.

Bappenas ujar Amalia juga akan terus mempererat sinkronisasi kebijakan lintas sector melalui kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), untuk memastikan kebijakan pengembangan ekonomi syariah selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini termasuk koordinasi dalam kebijakan yang mendukung perbankan syariah, industri halal, zakat, wakaf, dan pembiayaan UMKM berbasis syariah.

Bappenas imbuhnya juga berperan dalam merancang kebijakan strategis untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang meliputi sektor riil (industri halal), sektor keuangan (bank dan non-bank syariah), dan sektor sosial (zakat, wakaf, dan dana sosial syariah). Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Peran strategis Bappenas lainnya yakni melakukan identifikasi dan menyusun program serta proyek pembangunan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengembangan industri halal, infrastruktur berbasis pembiayaan syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Di bidang penguatan industri halal, Bappenas juga merancang kebijakan dan program, termasuk dalam sektor makanan, farmasi, kosmetik, dan pariwisata halal. Bappenas juga mendorong pengembangan kluster industri halal yang dapat bersaing di pasar internasional.

Yang tidak kalah pentingnya di dalam pengembangan SDM dan riset ekonomi syariah, Bappenas turut mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah melalui inisiatif pelatihan, pendidikan, dan riset. Dukungan riset dan data terkait ekonomi syariah sangat penting untuk menyusun kebijakan strategis lainnya berbasis bukti.

Dengan demikian, Bappenas memainkan peran sentral dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan memantau pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sejalan dengan visi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan

“Mari kita dorong bersama-sama pengembangan ekonomi syariah baik di pusat maupun di daerah. Supaya yang jelas pembangunan itu akan berhasil kalau derap langkahnya dari pusat dan daerah itu sama termasuk dalam pembangunan ekonomi Syariah,” pungkasnya.



Penguatan Legalitas Pembentukan KDEKS Sebuah Keniscayaan

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dr. Roberia, SH, MH

KOMITE Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) memiliki posisi strategis di dalam mendukung pelaksanaan ekonomi nasional pada umumnya. Untuk itu legalitas pembentukan KDEKS yang dibuat melalui Keputusan Gubernur bisa diperkuat melalui Peraturan Presiden. Hal ini disampaikan oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dr. Roberia, kepada Insight.

Melalui keputusan Gubernur tersebut kini sudah 31 provinsi memiliki KDEKS yang beroperasi dan memiliki legalitas kuat. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, legalitas KDEKS dari keputusan Gubernur, menurut Roberia, perlu diperkuat guna merespons semakin urgennya percepatan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di banyak daerah.

"Jika pembentukan KDEKS tertuang dalam Peraturan Presiden maka KDEKS memiliki legalitas yang lebih kuat. Namun, jika Peraturan Presiden belum dapat dibentuk, maka Keputusan Gubernur pun merupakan legalitas pembentukan KDEKS," ujarnya.

Roberia menjelaskan, legalitas yang dimaksud yakni adanya dasar hukum atau memiliki kepastian hukum perihal pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh daerah di Indonesia. *"Perihal legalitas perlu dipahami mengenai hukum. Dalam konsep yang lebih luas, hukum tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan,"* jelasnya.

Dia menambahkan jika pandangan hukum terbatas pada peraturan perundang-undangan, maka sampai saat ini, KDEKS belum memiliki legalitas, karena belum ada undang-undangnya. Meski begitu, Roberia menilai, pembentukan KDEKS sangat penting untuk menyegarkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sehingga ke depan sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan penguatan perundang-undangan atau aspek legalitas yang lebih tinggi.

URGENSI PEMBENTUKAN KDEKS

Melihat posisi dan potensi ekonomi dan keuangan Syariah di Tanah Air, Kemenkumham RI menilai, pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) dan KDEKS merupakan sebuah keniscayaan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sekaligus menyambut perkembangannya di masyarakat internasional.

Sehingga dalam pelaksanaannya, membutuhkan subjek hukum yang kuat. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membutuhkan lembaga khusus yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada lembaga di tingkat pusat terkait hal itu, misalnya peran KNEKS sangat strategis. Roberia menuturkan, dalam memahami konsep negara hukum, subjek hukum pada tingkat pusat tidak cukup. Sehingga, dibutuhkan lembaga khusus di daerah yang dapat memberikan gagasan, rekomendasi, dan evaluasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Kebutuhan lembaga di daerah tersebut menjadi urgensi pembentukan KDEKS. Saat ini pada banyak forum, ekonomi syariah bukan menjadi sesuatu yang dipahami sektoral atau parsial, tetapi sudah menjadi brand universal. Dengan penerapan ekonomi syariah, tidak hanya diperuntukkan masyarakat muslim saja, namun semua pihak dapat menikmati manfaatnya," sambungnya.



PERAN PENDAMPINGAN

Pada tingkat nasional, legalitas badan kelembagaan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diperlukan Peraturan Presiden. Untuk mencapainya terdapat sub tahapan yang perlu dilalui sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden. Salah satu yang harus dilakukan Kemenkumham yakni harmonisasi peraturan dan perundang-undangan.

"Kemenkumham terlibat langsung dalam proses harmonisasi KNEKS. Kemenkumham semakin intens mengawal pembentukan lembaga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata dia. Ditambahkan, urgensi pembentukan KDEKS menjadi salah satu perhatian yang sangat serius bagi Kemenkumham.

Dalam produk hukum pembuatan Perda atau Perkada, Kemenkumham akan mendorong percepatan pembentukan KDEKS.

"Kemenkumham ikut mengawal dan mendorong pembentukan KDEKS dengan melakukan komunikasi informal dengan KNEKS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Saat Kemenkumham diundang maka akan menyegerakan terbentuknya KDEKS di setiap provinsi di Indonesia," paparnya.

Lebih jauh ditegaskan bahwa peran Kemenkumham sangat strategis untuk mengawal terbentuknya KDEKS di seluruh provinsi di Indonesia. Hal itu mengingat, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) diharmonisasi oleh Kantor Kemenkumham setiap provinsi di Indonesia.

Roberia mengaku optimistis bahwa nantinya di setiap provinsi di Tanah Air memiliki satu KDEKS. "Jika seluruh pihak telah memahami aspek urgensi kelembagaan dalam negara hukum, tentu KDEKS akan bergerak dinamis ke depan bahkan hingga tingkat kabupaten dan kota," jelasnya.

Diakui, saat ini, KDEKS mengharapkan legalitas yang lebih tinggi dari Keputusan Gubernur, sementara dalam banyak forum telah disampaikan bahwa Keputusan Gubernur merupakan legalitas. "Kementerian Dalam Negeri pun memahami urgensi pembentukan KDEKS. Untuk menjaga komitmen tersebut, diharapkan dapat segera dilaksanakan revisi pada Perpres KNEKS untuk memasukan satu pasal atau satu ayat mengenai pembentukan lembaga ekonomi dan keuangan syariah di daerah sehingga komitmen para pemangku kepentingan dapat terjaga," terangnya.

Dia menambahkan diperlukan adanya strategi dari KNEKS agar KDEKS menjadi garda terdepan untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka Dunia. Hal itu karena KDEKS tidak dapat dilepaskan dari hierarki KNEKS. Meski KDEKS secara langsung berada di Pemerintah Daerah. Tetapi secara substansial, tugas dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan KNEKS.

PENGEMBANGAN KDEKS

Pemerintah melalui Kemenkumham menurut Roberia akan terus memperkuat regulasi atau perundang-undangan yang mendukung pembentukan KDEKS dan perkembangan KNEKS, baik dilakukan secara formal dan informal.

"Secara formal tahapan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat dipenuhi. Pada hierarki peraturan perundang-undangan terdapat tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pendekatan dan pengundangan," paparnya.

Secara informal hal tersebut bisa dilakukan melalui berbagai diskusi dan kajian mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Kemenkumham berharap hal tersebut, dapat terus dilaksanakan sehingga segera lahir produk hukum pada hierarki undang-undang yang berisi kebijakan strategis.

Dengan begitu, diharapkan juga ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang lebih baik. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara hukum, tidak ada lagi perdebatan bahwa ekonomi dan keuangan syariah hanya diperuntukan bagi umat Islam saja.

"Penerapan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Selain itu, tujuan Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dapat terlaksana dengan segera dan baik," tutupnya.



Eksistensi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Direktur Eksekutif KDEKS Sumatra Barat H. Ahmad Wira, M.Si, M.Ag, Ph.D

IMPLEMENTASI ekonomi dan keuangan syariah kini terus bertumbuh di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Apalagi sebagai salah satu negara yang mayoritas warganya beragama Islam keberadaan dan praktik ekonomi dan keuangan syariah ialah sebuah keniscayaan. Alasan lain, potensi pasar halal secara global juga terus berkembang sebagai peluang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia pun diyakini bisa menjadi hub ekonomi halal.

Melalui berbagai regulasi yang telah ada, pemerintah tampak serius menggarap ekonomi dan keuangan syariah dengan membentuk lembaga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Komite serupa di tingkat provinsi yakni Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Keberadaan KDEKS dinilai sangat strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi syariah di daerah dengan merata. Meski demikian terhubungnya ekonomi syariah antar daerah masih membutuhkan upaya keras dari seluruh stakeholder baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat secara luas.

Dalam kaitan ini Insight mewawancarai **Direktur Eksekutif KDEKS Sumatra Barat H. Ahmad Wira, Ph.D** terkait urgensi dari keberadaan KDEKS dan tantangan apa saja yang harus diatasi kedepannya:



Kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS, pada rapat pleno pertama KNEKS, 30 November 2021. Dasar hukum yang menjadi acuan pendirian KDEKS di Sumbar adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Urgensi dari pembentukan KDEKS terletak pada perlunya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar. KDEKS bertindak sebagai perpanjangan tangan dan koordinasi dari KNEKS, memungkinkan implementasi kebijakan dan program ekonomi syariah secara lebih efektif di tingkat daerah.

Dengan hadirnya KDEKS, kami dapat menyatukan gerakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar bersama pemangku kepentingan terkait. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem dan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan. KDEKS memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat, sehingga tujuan pengembangan ekonomi syariah dapat tercapai dengan lebih cepat dan terarah.

APA HAL YANG MENJADI URGENSI DARI PEMBENTUKAN KDEKS DI SUMATRA BARAT?

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Sumatra Barat (Sumbar) bisa berdiri karena kepedulian dari pemangku kebijakan dan kondisi filosofis masyarakat di Sumatra Barat yang mendukungnya. Komite ini terbentuk pada awalnya hanyalah sebuah perbincangan di kalangan akademisi. Berbagai diskusi dilakukan agar daerah mendapatkan dukungan secara eksplisit dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selaku lembaga pemerintah yang bertugas sebagai katalisator percepatan ekonomi nasional. Kelembagaan ekonomi syariah daerah dalam hal ini pembentukan KDEKS

APA SAJA POTENSI, KONTRIBUSI DAN PERAN KDEKS DALAM MENDORONG KEBANGKITAN PEREKONOMIAN DI SUMBAR DAN NASIONAL?

Salah satu bukti konkret urgensi keberadaan KDEKS adalah memperkuat Bank Nagari yang merupakan bank milik pemerintah daerah Sumbar, dalam melayani para pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mendukung hal tersebut kami telah melakukan pelatihan terkait lembaga keuangan syariah di tingkat manajemen hingga staf sebagai upaya pemenuhan sumber daya manusia. Teknologi perbankan syariah di Bank Nagari pun telah disiapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan market share keuangan syariah di Sumbar dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.

KDEKS juga terus menggaungkan pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim di Sumbar. Kami memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyelenggaraan pariwisata halal. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat menguatkan ekonomi di Sumbar melalui industri wisata halal, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Pengembangan industri wisata halal sangat strategis bagi Sumbar dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri halal.

KDEKS Sumbar juga melakukan percepatan sertifikasi halal UMKM. Saat ini masih banyak daerah di Sumbar yang belum mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal, sehingga kami menganggapnya sebagai darurat sosialisasi. Oleh karena itu, literasi dan edukasi pelaku usaha terkait produk dan sertifikasi halal terus dilakukan oleh KDEKS Sumbar. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Dengan semua inisiatif ini, KDEKS Sumbar berperan penting dalam mendorong kebangkitan perekonomian nasional melalui penguatan sektor keuangan syariah, pengembangan pariwisata halal, dan peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM. Kami percaya bahwa langkah-langkah ini tidak hanya akan menguatkan ekonomi Sumbar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

APA SAJA TANTANGAN TERBESAR DARI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH KHUSUSNYA DI SUMBAR?

Ekonomi Sumbar yang masih didominasi UMKM memerlukan strategi bagaimana produk-produknya dapat memasuki pasar ritel modern. Selain itu, juga perlu ada upaya agar produk UMKM halal bisa diekspor ke luar negeri. Sumatra Barat memiliki peluang besar untuk menjadi pusat produk halal nasional maupun internasional dengan didukung oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Di sisi lain tantangan terbesar dalam pengembangan KDEKS sendiri saat ini adalah mengenai regulasi keberadaan KDEKS. Diharapkan terdapat Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat atau menjadi dasar pembentukan KDEKS. Keberadaan regulasi ini penting agar KDEKS memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, KDEKS melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif. Peran KDEKS sebagai katalisator perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah harus dipahami dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. Kami terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua program dan inisiatif dapat berjalan dengan lancar.

Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan ini, kami yakin KDEKS dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia pada umumnya, serta mendukung pertumbuhan UMKM halal untuk memasuki pasar ritel modern dan pasar internasional.



STRATEGI APA YANG AKAN DIMAINKAN KDEKS SUMATRA BARAT UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH?

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini merupakan momentum yang sangat penting. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memiliki salah satu program percepatan pembentukan komite ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Sumatra Barat menyambut baik inisiatif ini dan menjadi provinsi pertama yang mendirikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kehadiran KDEKS di Sumbar diharapkan dapat mendorong dan memperkuat regulasi di daerah.

Strategi KDEKS Sumbar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dimulai dengan menata apa yang menjadi persoalan utama. Sumbar memiliki filosofi adat dan potensi yang luar biasa. Mayoritas penduduk Sumbar beragama Islam, dan filosofi adat 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah' menempatkan Islam sebagai landasan utama dalam tata perilaku dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Sumbar.

Edukasi kepada masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan. Selain itu, membangun ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi utama.

KDEKS juga berfokus pada kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Kami juga menilai potensi lokal dan mengintegrasikannya dalam pengembangan program ekonomi syariah, memastikan bahwa setiap inisiatif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Sumbar.



APA HARAPAN AGAR KDEKS LEBIH EFEKTIF BERKONTRIBUSI PADA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL?

KDEKS di Sumbar diharapkan dapat menyatukan berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah ada di berbagai lembaga, baik organisasi perangkat daerah (OPD), kantor vertikal Kementerian dan Lembaga yang ada di daerah, asosiasi, akademisi, praktisi, pengusaha dan pelaku pasar, lembaga kerapatan adat, serta berbagai organisasi masyarakat. Dengan demikian, KDEKS dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan, memperkuat hubungan di tingkat nasional, sehingga program ekonomi dan keuangan syariah dapat tercapai dengan lebih mudah dan skala yang lebih besar.

Tugas dan fungsi KDEKS adalah memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kehadiran KDEKS diharapkan menjadi penggerak atau rujukan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar.

Secara langsung, KDEKS memberikan manfaat melalui pemberian dorongan, rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan dan arah kebijakan serta program strategis pembangunan daerah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini, KDEKS Sumbar tengah fokus dalam penguatan kelembagaan.

Harapan kami adalah setiap daerah di Indonesia dapat membentuk KDEKS. Pembentukan KDEKS di setiap daerah akan memperkuat dan mendorong perubahan peraturan. Semakin banyaknya kebutuhan pembentukan KDEKS di daerah diharapkan dapat mendorong revisi Perpres sehingga KDEKS dapat menjadi bagian dari KNEKS. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, KDEKS di setiap daerah diharapkan dapat memiliki anggaran sehingga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya bergerak di pusat tetapi juga di daerah-daerah. Dengan begitu, Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.



Sambut Potensi Besar Ekonomi Syariah Di NTB

Direktur Eksekutif KDEKS NTB Dr. H. Muhaimin, S.H., M.Hum.

Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya dikenal sebagai wilayah dengan keindahan alam dan panorama pantainya yang eksotik. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke NTB setelah berkunjung ke Bali sebagai sasaran travelling mereka.

Salah satu wilayah yang berlokasi di timur Tanah Air ini juga memiliki kekhasan tersendiri. Selain di sektor pariwisata, sektor kehutanan di NTB dengan cakupan lahan lebih dari 50 persen luas wilayah daratnya juga berpotensi besar untuk mendukung perekonomian daerah.

Mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam menjadikan NTB mempunyai modal besar untuk mempraktikkan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakatnya bertumbuh lebih cepat.

Untuk mengetahui bagaimana potensi ekonomi dan keuangan syariah di NTB dikembangkan lebih jauh. Berikut wawancara Insight dengan **Direktur Eksekutif KDEKS NTB Dr. H. Muhaimin, S.H., M.Hum.** Berikut petikannya:



APA SAJA POTENSI, KONTRIBUSI DAN PERAN KDEKS DALAM MENDORONG KEBANGKITAN PEREKONOMIAN NASIONAL?

KDEKS memiliki potensi besar dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam bidang industri, NTB memiliki halal tourism atau pariwisata ramah muslim. Tersedianya makanan dan minuman halal serta hotel syariah menjadikan NTB ramah bagi wisatawan muslim. Salah satu kontribusi KDEKS dalam mendorong kebangkitan perekonomian nasional yaitu edukasi, mengembangkan industri halal, memfasilitasi kerjasama, dan menarik investasi.

APA HAL YANG MENJADI URGENSI DARI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KDEKS?

Urgensi pembentukan KDEKS di NTB dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, mayoritas penduduk NTB beragama Islam, yaitu sekitar 96%. Hal ini menunjukkan potensi market yang besar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di NTB terbilang pesat, ditandai dengan berdirinya berbagai bank syariah dan proses konversi Bank Pembangunan Daerah menjadi bank syariah. Ketiga, NTB memiliki potensi Halal Tourism yang dapat mendukung Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia.



APA SAJA TANTANGAN TERBESAR DARI PENGEMBANGAN KDEKS DI INDONESIA?

Pertama; belum adanya payung hukum yang kuat di tingkat nasional dan daerah, sehingga menghambat legalitas dan operasional KDEKS. Kedua; keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional KDEKS, sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Ketiga; kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah terkait edukasi dan sosialisasi. Dan terakhir yaitu, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah, sehingga diperlukan dukungan pemda untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas KDEKS

APA YANG MENDORONG NTB UNTUK MENDIRIKAN KDEKS?

Pendirian KDEKS di NTB didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu:

Potensi Besar Market Ekonomi dan Keuangan Syariah: NTB memiliki potensi luar biasa untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, membuka peluang pasar yang besar. Ditambah lagi dengan pertumbuhan industri halal yang pesat, NTB siap menyambut masa depan yang gemilang di sektor ini.

Komitmen Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah NTB menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Komitmen ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan dan program yang diluncurkan, seperti pembentukan KDEKS NTB, pengembangan halal tourism, pemberian insentif bagi pelaku usaha syariah, dan peningkatan edukasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.

Dukungan Berbagai Pihak: Dukungan penuh dari berbagai tokoh dan lembaga terkait, seperti akademisi, ulama, dan pelaku usaha, menjadi faktor penting dalam mendorong pendirian KDEKS NTB. Sinergi yang solid antar pihak ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan NTB sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah yang terdepan di Indonesia.

BAGAIMANA PERJALANAN NTB DALAM PENDIRIAN KDEKS?

KDEKS di NTB dibentuk pada 2022, guna mendorong percepatan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di NTB. Kunjungan Manajemen Eksekutif KNEKS dalam rangka pembentukan KDEKS NTB disambut baik oleh Gubernur, dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret melalui penetapan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan KDEKS NTB. Selanjutnya, KDEKS NTB melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini bertujuan agar KDEKS di NTB memiliki payung hukum, dengan adanya payung hukum diharapkan dapat mempermudah dalam perizinan kegiatan, riset dan kajian.

APA STRATEGI NTB UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH MELALUI KDEKS?

Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di NTB, KDEKS melakukan berbagai strategi. Strategi pertama yang dilaksanakan adalah dengan melakukan konsolidasi internal KDEKS. Setelah itu, pembuatan payung hukum KDEKS di NTB yakni dengan pembentukan peraturan Gubernur. Agar kinerja KDEKS terarah perlu dilakukan penyusunan program kerja. Penyusunan program kerja dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. KDEKS NTB juga perlu melakukan Studi Banding (Benchmarking) dengan KDEKS lain yang telah lebih dulu berdiri. Selain itu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi yang diterapkan KDEKS di NTB.

APA MANFAAT YANG DIDAPAT MASYARAKAT DENGAN ADANYA KDEKS?

Masyarakat NTB akan merasakan manfaat luar biasa dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di wilayah mereka, yaitu kemudahan akses informasi, edukasi dan pelatihan yang mumpuni, peluang usaha baru yang menjanjikan, dan akses permodalan yang mudah untuk usaha syariah.



BAGAIMANA KDEKS Mendukung Perwujudan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka Dunia?

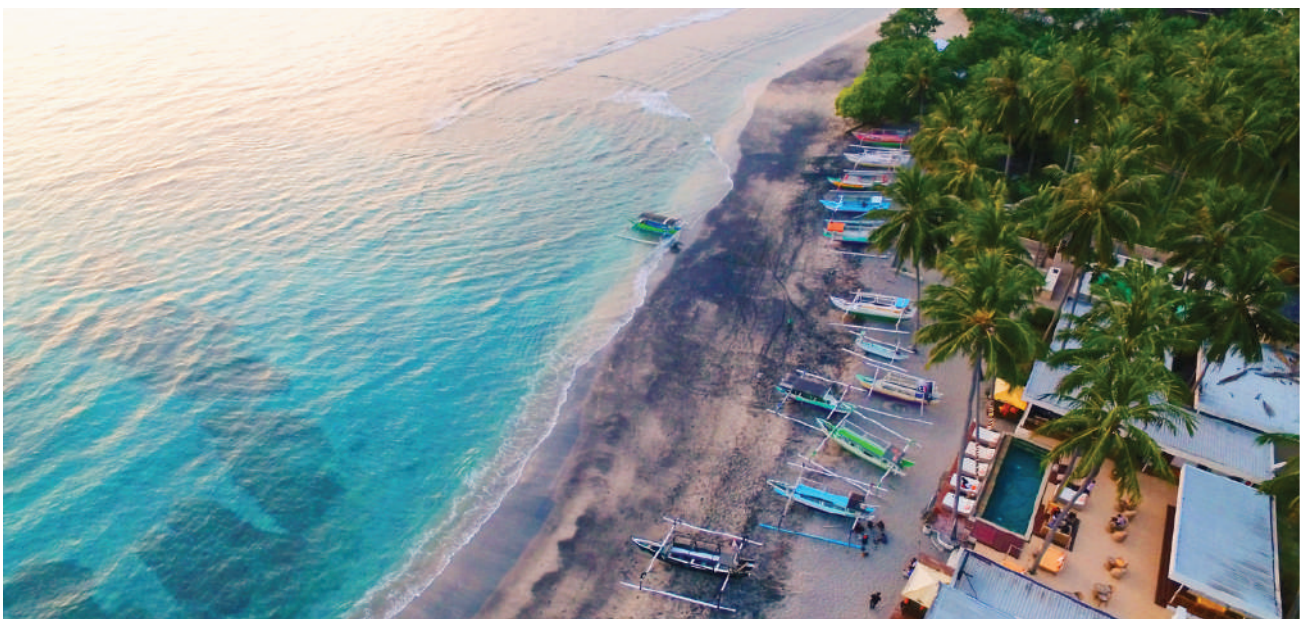
KDEKS NTB aktif mendorong pengembangan industri pariwisata ramah muslim dan ekonomi kreatif di NTB, dengan memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki NTB yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, KDEKS NTB membangun kerjasama dengan berbagai organisasi, para tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Keberadaan KDEKS diharapkan dapat menyatukan gagasan dan kontribusi untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah.

APA HARAPAN ANDA untuk Pengembangan KDEKS di Indonesia?

Saya berharap agar pembentukan KDEKS tidak hanya disandarkan kepada political will masing-masing daerah. Legalitas berupa Peraturan Presiden diharapkan dapat dibentuk untuk dapat menaungi keberadaan KDEKS sehingga setiap daerah dapat mendirikan KDEKS tanpa bergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Selain itu, dengan adanya KDEKS di NTB diharapkan dapat menjadi blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Para pemangku kepentingan pun diharapkan dapat menyadari bahwa upaya yang dilakukan KDEKS merupakan upaya untuk membangun umat dan peradaban dalam aspek bisnis yang sesuai syariah sehingga bisa bersinergi bersama.

APA SAJA Hikmah dan Hal-hal Positif yang dapat Diambil dalam Kondisi Sekarang ini terkait KDEKS?

Pembentukan KDEKS di NTB memberikan banyak hikmah dan hal positif, salah satunya adalah terjalin silaturahmi antara KDEKS dengan berbagai organisasi, para tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan. KDEKS juga menjadi salah satu wadah silaturahmi dan koordinasi pegiat ekonomi dan keuangan syariah antar daerah yang memiliki KDEKS di seluruh Indonesia. Keberadaan KDEKS diharapkan dapat menyatukan gagasan dan kontribusi untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah.





Saatnya Membumikan Gaya Hidup Halal

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KDEKS Jawa Timur, Mohammad Ghofirin

IMPLEMENTASI ekonomi syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini tengah berkembang dan bukan sebagai pelengkap dari keberadaan ekonomi konvensional yang berjalan selama ini. Itu terjadi tidak saja di negara yang mayoritas penduduknya muslim namun hampir semua negara di dunia.

Tentu saja ini sebuah peluang bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim termasuk daerah-daerah tertentu di Tanah Air. Jawa Timur ialah salah satu daerah yang sudah menangkap peluang ini. Maka tak heran sejak 2019 dimana pemerintah mencanangkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Pemprov Jawa Timur menyatakan sudah siap untuk menerapkannya.

Bagaimana upaya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) menyambut kehadiran ekonomi dan keuangan syariah yang juga sudah dijadikan sebagai program nasional. Berikut wawancara khusus Insight dengan **Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KDEKS Jatim Mohammad Ghofirin:**

APA URGENSI PEMBENTUKAN KDEKS DI JAWA TIMUR?

Kehadiran Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah, baik di tingkat nasional melalui KNEKS maupun di tingkat daerah melalui KDEKS, diharapkan mampu menjadi penerjemah konsep-konsep ekonomi syariah yang telah dihasilkan oleh para pemikir hebat di Republik ini menjadi sesuatu yang konkret dan bisa diaplikasikan.

Dalam sambutan saat pengukuhan KDEKS Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa ada fenomena fobia terhadap syariah di masyarakat. Ada ketakutan yang berlebihan bahwa jika kita menggunakan konsep syariah, seperti hotel syariah, maka tidak akan ada pengunjung. Ketakutan-ketakutan semacam ini justru dapat menghambat ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi dan literasi keuangan syariah agar masyarakat, bahkan yang awam sekalipun, dapat memahami konsep ekonomi syariah yang sebenarnya.

Atas arahan dan dorongan dari Bapak Wakil Presiden juga, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Jawa Timur dikukuhkan pada Desember 2022. Tidak lama setelah itu, alhamdulillah, KDEKS Jawa Timur berhasil meraih predikat juara umum meski baru berusia satu tahun.

BAGAIMANA DENGAN FENOMENA EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR SENDIRI?

Saya melihat, khususnya Jawa Timur, sudah saatnya menjadikan halal dan nilai syariah sebagai gaya hidup. Untuk menjadikannya sebagai gaya hidup, diperlukan habituasi (pembiasaan) yang tentunya membutuhkan akselerasi agar konsep-konsep dan teori-teori yang ada untuk dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita terjebak dalam seminar dan konferensi yang melahirkan ide-ide dan gagasan yang sangat baik, namun belum tentu bisa diaplikasikan.

Keberhasilan Jawa Timur mendapatkan Anugerah Adinata Syariah 2023, sebenarnya tidak mengherankan, karena sebelum KDEKS lahir, berbagai upaya, kegiatan, dan program untuk membumikan dan mengaplikasikan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur sudah berjalan. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, lembaga, institusi, perguruan tinggi, ormas, dan pondok pesantren di Jawa Timur sudah sangat peduli dan aktif dalam kegiatan ekonomi syariah. KDEKS Jawa Timur hanya perlu menjahit dan merangkai apa yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, dinas, kementerian, tadi untuk mencapai sinergi dan kolaborasi.

Inilah yang menjadi faktor utama mengapa Jawa Timur berhasil meraih banyak prestasi, seperti juara satu di industri halal, keuangan mikro syariah, ekonomi pesantren, dan lainnya. Prestasi ini bukan diraih karena ingin jadi juara, melainkan karena Jawa Timur sudah menjalankan semua program dengan baik, sesuai dengan kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

BAGAIMANA KDEKS JAWA TIMUR MEMANDANG REGULASI YANG ADA SEKARANG?

Kalau berbicara mengenai regulasi yang mengatur pembentukan KDEKS harus diakui bahwa saat ini regulasinya masih terbatas. Ketika KDEKS didirikan, dorongan utamanya datang dari Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Harian KNEKS meskipun secara formal belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur pembentukan KDEKS di tingkat daerah, baik itu dalam Peraturan Presiden maupun regulasi lainnya.

Banyak daerah merasa termotivasi dalam menjalankan KDEKS. Di sini, kita melihat perlunya regulasi yang lebih kuat. Teman-teman di KNEKS saat ini sedang mengupayakan agar status KNEKS bisa ditingkatkan menjadi sebuah Badan yang memiliki otoritas lebih, yang tentunya akan membantu mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Di daerah, kami juga melihat pentingnya regulasi yang lebih jelas. Saat ini, di Jawa Timur, masih belum melihat adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur tentang KDEKS. Ini menjadi tantangan besar, karena tanpa regulasi yang kuat, upaya-upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bisa terhambat, baik dari segi implementasi maupun alokasi anggarannya.

Tugas utama KDEKS memang melakukan koordinasi dan komunikasi, tetapi tanpa pendanaan yang cukup, tentu akan banyak hambatan yang dihadapi. Meskipun kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional dengan kementerian dan lembaga maupun di tingkat provinsi dengan OPD dan mitra strategis lainnya, regulasi yang jelas dan kuat tetap menjadi fondasi utama untuk mendukung semua upaya ini.

Ada juga diskusi yang menarik mengenai pembentukan KDEKS di tingkat kabupaten dan kota. Provinsi Jawa Timur membentuk KDEKS berdasarkan dorongan langsung dari Bapak Wakil Presiden, tetapi untuk kabupaten dan kota, masih belum ada arahan dan imbauan resmi dari Presiden atau Wakil Presiden selaku Pimpinan KNEKS untuk mendorong pembentukannya.

Sejauh ini, saya dengar hanya ada satu KDEKS di tingkat kabupaten yang sudah dibentuk di Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Pejabat dari Lembaga pemerintah yang tengah ditugaskan sebagai penjabat pimpinan daerah kabupaten/kota yang paham betul akan pentingnya keberadaan KDEKS di tingkat kabupaten/kota.

Hubungan antara KNEKS di pusat dan KDEKS di daerah juga masih perlu diperkuat, bukan hanya dalam hal koordinasi, tetapi juga dalam hal pendanaan. Dengan adanya dukungan APBN yang bisa disalurkan ke daerah, penguatan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia bisa lebih optimal.

BAGAIMANA UNTUK MENGEMBANGKAN KDEKS DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, MUNGKINKAH?

Di tingkat kabupaten dan kota, kami juga sedang berupaya mengkomunikasikan pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji dan menyiapkan peraturan yang relevan, baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota, atau bahkan instruksi atau surat edaran. Hal ini penting agar kegiatan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya didukung oleh kebijakan, tetapi juga oleh anggaran yang memadai.

BAGAIMANA STRATEGI JAWA TIMUR UNTUK MEMPERTAHANKAN PREDIKAT JUARA UMUM ANUGERAH ADINATA SYARIAH 2023?

Perlu ditegaskan bahwa Jawa Timur tidak menjadikan predikat Juara Umum sebagai target utama. Dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kami terus melakukannya secara masif dan terstruktur di bawah komando Gubernur. Fokus kami adalah mencapai titik pemahaman yang sama, yaitu memasyarakatkan syariah, bukan sekadar mensyariatkan masyarakat. Artinya, kami ingin menjadikan syariah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur melalui berbagai sektor.

Sektor-sektor yang kami dorong meliputi industri halal seperti makanan, minuman, fashion sebagai bagian dari gaya hidup, serta pariwisata, termasuk hotel dan destinasi wisata yang kami dorong menjadi ramah Muslim, menggantikan istilah 'wisata halal.' Selain itu, sektor lain seperti kosmetika, obat-obatan, dan bahkan produk tradisional seperti jamu juga menjadi fokus pengembangan kami.

Perlu dicatat bahwa sebelum lahirnya KDEKS dan adanya Anugerah Adinata Syariah, Jawa Timur sudah memiliki program unggulan seperti One Pesantren One Product (OPOP) yang lahir pada 2019, jauh sebelum KDEKS didirikan pada 2022. Program OPOP ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan santri, pesantren, dan alumni dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Jadi, sebenarnya, apa yang diinginkan oleh KDEKS sudah lama kami lakukan bahkan sebelum adanya penilaian untuk Adinata Syariah.

Ketika kita berbicara tentang strategi untuk tahun depan, misalnya 2025, tentu saja sekarang kita sudah tahu aspek apa saja yang dinilai. Namun, yang membuat Jawa Timur unggul di 2023 adalah bahwa kami tidak tahu apa yang akan dinilai, tetapi kami tetap fokus pada tujuan utama kami, yaitu menjadikan syariah sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jadi, strategi utama kami bukan hanya untuk mempertahankan predikat Juara Umum, tetapi untuk terus meningkatkan implementasi syariah di berbagai sektor secara berkesinambungan, dengan menjadikannya bagian dari gaya hidup masyarakat Jawa Timur.

BAGAIMANA KESIAPAN SDM DI JAWA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH?

Terkait kesiapan SDM, terutama di industri halal, baik pemerintah pusat maupun daerah benar-benar fokus pada penyediaan tenaga pendamping dan tenaga penyedia halal. Hal ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lisensi halal yang otentik dan tertulis semakin meningkat. Bukan hanya dari sisi kesadaran, tetapi juga dari segi kesiapan produsen untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Namun, kita juga harus mengakui bahwa ada tantangan besar, terutama bagi produsen yang berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil. Mereka seringkali kesulitan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Di sisi lain, SDM di sektor pendampingan juga perlu diperkuat agar mereka bisa membantu produsen dalam proses ini.

Kita sering melihat produsen yang merasa tidak perlu sertifikasi halal karena yakin bahwa produknya sudah halal secara intrinsik. Ini terutama terjadi di Jawa Timur, yang dikenal sebagai kota santri dan gudangnya pesantren. Keyakinan ini juga berlaku di kalangan konsumen, yang sering kali merasa tidak perlu meragukan kehalalan produk lokal.

Namun, permasalahan muncul ketika produk tersebut harus dijual ke luar daerah atau ke pasar yang lebih luas, di mana sertifikat halal menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan bahwa regulasi dan aturan terkait sertifikasi halal masih sering diabaikan oleh produsen, tetapi ketika konsumen menolak produk yang tidak bersertifikat, barulah produsen merasakan dampaknya. Oleh karena itu, upaya literasi dan edukasi terus-menerus kepada SDM kita menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang SDM dari sisi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga dari sisi konsumen.

Jika seluruh konsumen di Indonesia bersikap tegas hanya mau mengonsumsi produk yang bersertifikat halal, produsen akan segera memenuhi standar tersebut. Namun, saat ini masih ada konsumen yang merasa tidak perlu sertifikasi, karena yakin produk tersebut sudah halal. Inilah yang harus kita ubah melalui edukasi dan literasi agar semua pihak—baik produsen, fasilitator, maupun konsumen—sama-sama berkomitmen pada pentingnya sertifikasi halal.

APA STRATEGI KDEKS JAWA TIMUR DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN EKONOMI SYARIAH DI TINGKAT GLOBAL?

Untuk menghadapi persaingan global, kita tidak bisa setengah-setengah. Harus total. Ibarat istilah dalam sepak bola, kita harus bermain dengan 'total football', di mana seluruh kekuatan harus diarahkan menuju tujuan yang sama. Sampai hari ini, masih ada perdebatan terkait dengan posisi Indonesia di pasar produk halal global. Kita harus menentukan dengan jelas, apa yang akan menjadi produk halal unggulan Indonesia di pasar internasional.

Jawa Timur sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kami mengembangkan Halal Industrial Park (HIPS), di mana program-program pengembangan ekonomi syariah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pesantren, kampus, instansi, hingga sekolah kuliner. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan syariah juga terus dilakukan, terutama bagi pelaku UMKM, pelajar, dan masyarakat luas.

Namun, kita juga harus mengakui bahwa meskipun strategi ini berjalan, skalanya masih perlu diperluas agar kita bisa bersaing di tingkat global.

APA TANTANGAN TERBESARNYA?

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan produk-produk halal kita bisa bersaing di pasar ekspor. Contohnya, Jawa Timur telah berhasil mengekspor minuman berkarbonasi rasa kopi ke negara-negara seperti Malaysia, Australia, dan India. Selain itu, produk tradisional seperti songkok dan sarung dari Jawa Timur telah diekspor ke delapan negara. Meskipun beberapa produk ini belum memiliki sertifikasi halal, mereka tetap diterima di pasar internasional.

Namun, ini adalah PR besar bagi kita semua, bagaimana mendesain strategi yang tepat untuk menentukan komoditas unggulan yang bisa membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Tantangan ini tidak mudah, tetapi dengan upaya yang konsisten dan strategi yang tepat, saya yakin kita bisa memenangkan persaingan global di sektor produk halal.

BAGAIMANA DENGAN DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN DI JAWA TIMUR PADA KEGIATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH?

Bank Daerah Jawa Timur, khususnya Bank Jatim Syariah, memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi ini. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Keputusan ini memperkuat upaya akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur.

Dalam sektor keuangan syariah, Bank Jatim Syariah telah berperan sebagai agregator atau penggerak utama dalam keuangan daerah. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan insentif kepada UKM yang melakukan pembiayaan melalui Bank Jatim Syariah, di mana biaya ekuivalen yang dikenakan hanya setengahnya karena ada insentif dari pemerintah provinsi.

Bank Jatim Syariah juga aktif dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Beberapa produk yang telah diterbitkan antara lain Tabungan Santri dan Tabungan Umroh. Tabungan Santri, misalnya, merupakan produk terbaru yang didesain untuk mendukung inklusi keuangan syariah di kalangan pelajar dan pesantren.

Selain melalui perbankan, dukungan terhadap ekonomi syariah juga dilakukan dengan memperkuat lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi syariah dan koperasi pondok pesantren (Kopontren). Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat menekankan pentingnya menghindari praktek-praktek lintah darat, termasuk pinjaman cepat dan pinjaman online yang seringkali merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, Bank Jatim Syariah, bersama dengan Bank UMKM dan Bank Syariah Indonesia, diarahkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek-praktek rentenir di Jawa Timur.

Dengan langkah-langkah ini, Bank Jatim Syariah berperan penting dalam memperluas dan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur, sesuai dengan visi Gubernur untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.





KDEKS sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Mahasiswa Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, Program Associate Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Afidah Nur Aslamah

SEBAGAI upaya mewujudkan salah satu dari 13 program prioritas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditetapkan pada Rapat Pleno Pertama KNEKS pada 30 November 2021 dan secara eksplisit di Rapat Pleno Kedua KNEKS, 30 Mei 2022, Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS mengarahkan untuk pembentukan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah) di seluruh Provinsi di Indonesia.

Secara kelembagaan, KNEKS dan KDEKS merupakan lembaga pemerintah non-struktural dan bersifat ad hoc yang bertujuan sebagai katalisator percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah untuk mendukung penguatan ekonomi nasional.

Kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam ekosistem ekonomi syariah, yang berfungsi sebagai katalisator percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, sebagai upaya mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024.

Keberadaan KDEKS di daerah diyakini memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Provinsi pertama yang telah mendirikan KDEKS yaitu Provinsi Sumatera Barat, diikuti oleh Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

KDEKS Sumatera Barat (Sumbar) sebagai yang pertama di Indonesia terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 500-315-2022, pada 7 April 2022. memiliki visi yang sejalan dengan provinsinya yaitu Adat yang bersendikan Syariat yang bersumber dari Alquran atau dikenal dengan 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah'. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah selaku Ketua dan Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua.

Anggota KDEKS Sumatera Barat terdiri dari Lembaga/Instansi, Organisasi Pemerintah Daerah terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah. Adapun Manajemen Eksekutif KDEKS dipimpin oleh Ahmad Wira selaku Direktur Eksekutif, dan Muhammad Sobri selaku Wakil Direktur Eksekutif. Manajemen Eksekutif terdiri dari 5 Direktorat yaitu Industri Produk Halal, Jasa Keuangan Syariah, Keuangan Sosial Syariah, Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, serta Infrastruktur Ekosistem Syariah.

Tiga bulan berselang, Provinsi Riau juga resmi membentuk KDEKS berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor 1122/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022. Adapun struktur KDEKS Riau tersebut diketuai oleh Gubernur Riau Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua, Sekdaprov Riau sebagai Sekretaris, dan Saidul Amin, sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Riau.

Provinsi Riau menindaklanjutinya dengan Menyusun Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang menjadi landasan hukum dalam mensinergikan program Ekonomi Syariah di Bumi Lancang Kuning ini. Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah memiliki ruang lingkup meliputi percepatan regulasi, perencanaan dan pendataan, pengembangan industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan sosial syariah, keuangan dan pembiayaan syariah, infrastruktur pendukung, kelembagaan, serta promosi produk ekonomi dan keuangan syariah.





Tak lama sejak KDEKS Riau resmi terbentuk, Provinsi Sumatra Selatan membentuk KDEKS ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor : 583/KPTS/IV/2022, tanggal 10 Agustus 2022. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan bergerak cepat dalam pembentukan KDEKS Sumsel untuk menjadi loncatan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatra Selatan.

Secara umum struktur KDEKS Sumatra Selatan terdiri dari unsur Pimpinan KDEKS yaitu Ketua dan Wakil Ketua; Anggota yang terdiri dari kantor vertikal Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta organisasi, serta institusi lainnya yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah daerah.

Unsur berikutnya adalah, Sekretaris dan sekretariat yang berada di bawah naungan Sekretariat Daerah Sumatra Selatan dan terakhir sebagai unsur penggerak dan think-tank adalah Manajemen Eksekutif KDEKS. KDEKS Sumatra Selatan dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatra Selatan selaku Ketua Wakil Ketua oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Selatan,; Sekretaris oleh Sekretaris Daerah,; Direktur Eksekutif oleh Kholid Mawardi; serta Wakil Direktur Eksekutif oleh Achmad Syamsudin.

Program unggulan yang dicanangkan KDEKS Sumatra Selatan melalui programnya di antaranya bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan optimalisasi pengelolaan dana sosial syariah dan mendukung usaha mikro dan kecil, ketahanan pangan daerah, percepatan sertifikasi halal, pembangunan kawasan halal baik untuk UMKM dan industri. Berikutnya mendorong sektor pariwisata ramah muslim termasuk kuliner dan makanan minuman halal, mendorong dukungan permodalan dari sektor jasa keuangan syariah baik dari institusi keuangan mikro syariah, perbankan dan non-perbankan syariah. Tentunya hal-hal tersebut disertai dengan peningkatan literasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah, di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Tiga provinsi berikutnya yang menyusul Sumatra Barat, Riau, dan Sumatra Selatan dalam membentuk KDEKS yaitu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Pembentukan KDEKS Sulawesi Selatan merupakan bentuk komitmen dan langkah strategis Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan, guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang KDEKS, Gubernur dan Wakil Gubernur bertindak sebagai Pengarah KDEKS, Sekretaris Daerah selaku Ketua/Penganggung Jawab, adapun Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KDEKS diamanahkan kepada Dr. Mukhlis Sufri, S.E., M.Si, dan Wakil Direktur Eksekutif kepada M. Rusdi, S.Si., M.Si.Apt.

Berbagai potensi dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan yang diakselerasi oleh KDEKS. Diantaranya pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), dimana sudah ada Kawasan Industri eksisting yang dapat dioptimalkan fungsinya (Kawasan Industri Makassar-KIMA), pengembangan sektor bisnis, kewirausahaan syariah, UMKM dan Industri Produk Halal; mulai dari pembinaan dan inkubasi bisnis syariah, percepatan sertifikasi halal, hingga upscaling dan percepatan ekspor produk halal. Berikutnya, mendorong pengembangan makanan minuman halal, mendorong standarisasi halal rumah potong hewan, penambahan Zona KHAS yang saat ini sudah ada di lego-lego, mendorong potensi pariwisata ramah muslim, modest fashion, media dan rekreasi halal, serta potensi pengembangan rumah sakit berstandar halal. Dukungan permodalan dari sektor keuangan syariah daerah, melalui percepatan proses konversi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan–Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) menjadi Bank Sulselbar Syariah, merupakan salah satu program prioritas untuk mendukung kapitalisasi sektor bisnis dan industri produk halal di Sulawesi Selatan.

Setali tiga uang dengan KDEKS Sulawesi Selatan yang secara resmi dikukuhkan pada Desember 2022 lalu, KDEKS Jawa Timur juga resmi dikukuhkan di bulan yang sama. KDEKS Jatim adalah bukti komitmen Pemprov Jatim dalam upaya meneruskan perwujudan ekonomi dan keuangan syariah yang sudah cukup baik.

Saat ini, ada 38 Halal Center dengan 5000 pendamping yang memiliki sertifikasi halal. Selain itu sudah ada 55 rumah potong hewan halal, empat lembaga pemeriksa halal, meliputi MUI dan beberapa kampus, lembaga surveyor, serta Sucofindo. Jatim sendiri juga sudah memiliki kawasan industri halal yang didorong oleh penerbitan surat edaran terkait pembentukan pusat halal Jawa Timur tentang OPOP (One Pesantren One Product).

Kehadiran KDEKS di Jawa Timur dipastikan dapat mendorong percepatan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur. Jika KDEKS bisa bekerja dengan baik, simpul-simpul ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur sangat banyak. Tinggal melakukan sinkronisasi dan sinergi di antara simpul-simpul itu.

Pengembangan ekonomi syariah di Jatim akan bisa berjalan dengan baik karena juga didukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara umum bergerak di bidang-bidang ekonomi syariah. KDEKS harus bisa mendorong perbankan syariah, misalnya, untuk memiliki komitmen tinggi guna membiayai UMKM. Jawa Timur sendiri memiliki Bank Jatim dan Bank UMKM yang memiliki kapasitas besar dan memiliki unit usaha syariah. Jumlah UMKM yang mencapai 10 juta seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi halal.



Kedepannya, KDEKS tentu diharapkan dapat menguatkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi motor penggerak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang unggul dan berkelanjutan. Sebagaimana tugas dan fungsi utama KDEKS yaitu untuk kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga dapat memperbaiki tata kerja atau proses bisnis yang ada di semua wilayah agar kegiatan ekonomi dan keuangan syariah bisa terintegrasi dan disinergikan.

Beberapa provinsi di Indonesia juga menyusul dan telah membentuk KDEKS seperti Provinsi Gorontalo pada 14 April 2023 yang pengukuhanannya dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin kala itu. Pendampingan pun terus dilakukan oleh pihak KNEKS dan berbagai stakeholders terkait. KDEKS yang sudah terbentuk di enam provinsi ini diharapkan dapat dijadikan percontohan bagi provinsi lain untuk dapat memiliki komitmen bersama membangun ekonomi syariah didaerahnya masing-masing.

KDEKS yang hingga akhir tahun 2024 ini hadir di 31 provinsi bukan tanpa alasan, melainkan sebagai katalisator perubahan yang signifikan. Sebagaimana menyelaraskan empat strategi utama yang tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pembentukan KDEKS adalah terobosan yang diharapkan secara efektif mampu bergerak sebagai lokomotif dan katalisator pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.



Highlight Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

#1
Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 & 2024
(#2 di 2022)


#1
Impactful Achievement in Islamic Economics (CWLS)


#3
Biggest Shareholder IsDB

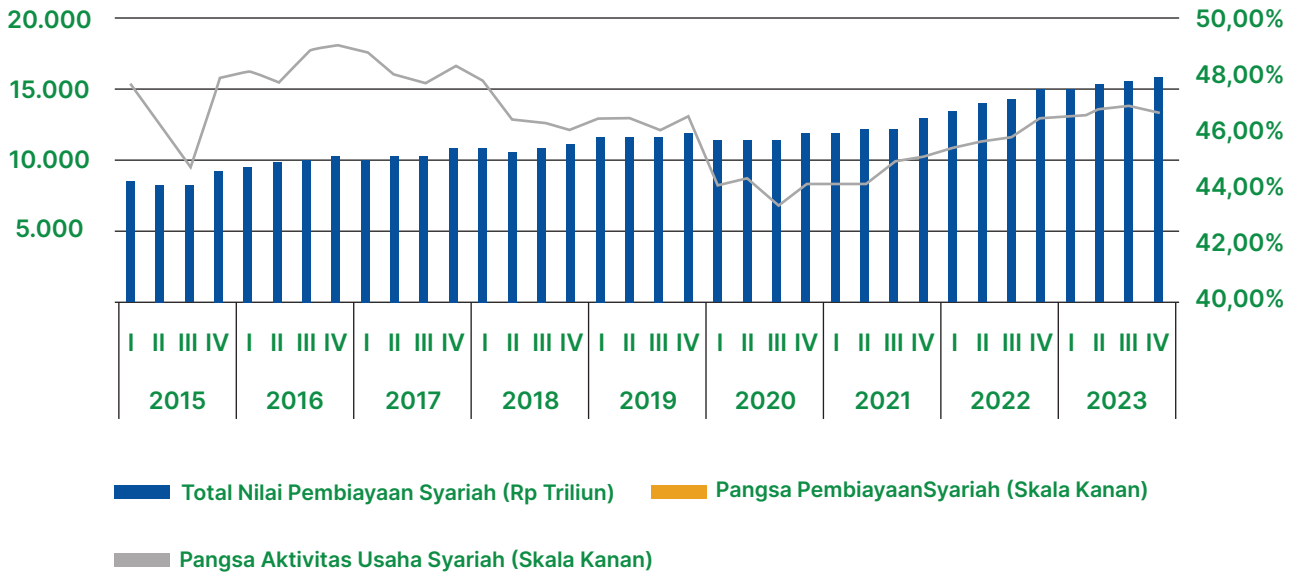

#3
Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023
(#11 di 2018)
DinarStandard

#3
Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2023
(#10 di 2018)

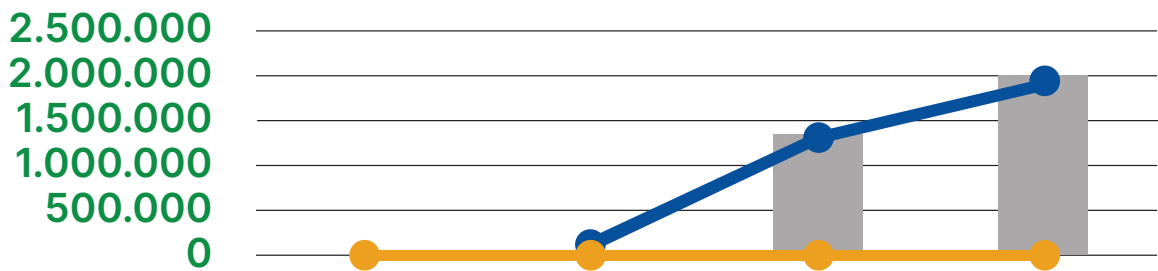

#3
Global Islamic Finance Report (GIFR), 2023
(#6 di 2018)


#3
Global Islamic Fintech Report 2023
(#4 di 2021)
DinarStandard

Kontribusi Usaha Syariah dan Pembiayaan Syariah ¹⁾ terhadap PDB 46,72% (± Rp 9.761 Triliun), tumbuh 0,19% YoY



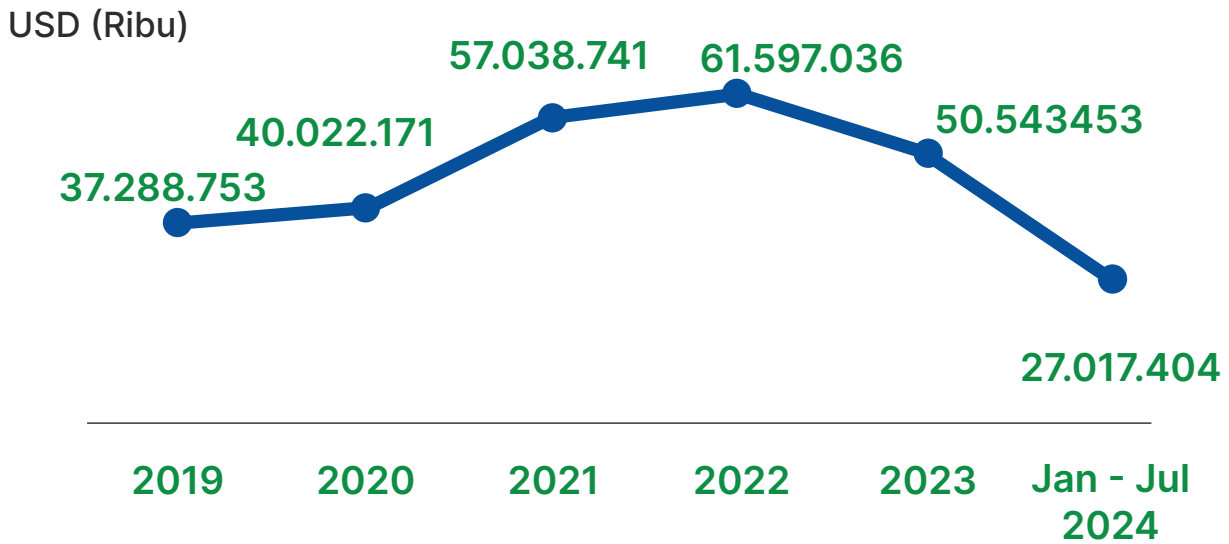
Sertifikasi Halal bertambah setiap tahunnya ²⁾, dengan total 1.983.762 SH terbit per 30 September 2024, tumbuh 45% dari 2023



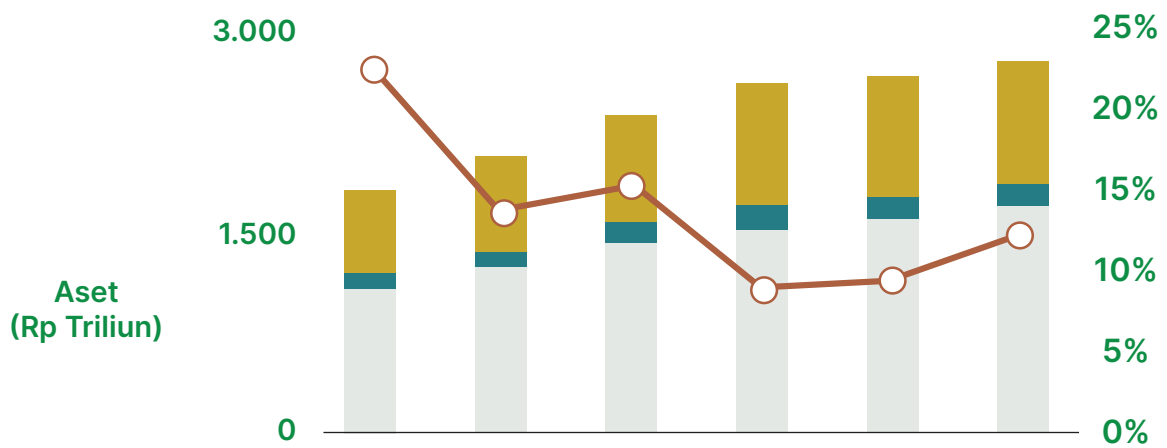
	2021	2022	2023	30 Sept 2024
TOTAL	23.236	130.994	1.364.184	1.983.762
SELF DECLARE	750	90.310	1.298.078	1.907.290
REGULER	22.486	40.684	66.106	82.472

¹⁾ hasil kajian DEKS BI; ²⁾ BPJPH,

Ekspor Produk Halal 2023 mencapai USD 50,5 Miliar, dalam 5 tahun terakhir meningkat 10,95% ³⁾



Total Aset Keuangan Syariah ⁴⁾ Juni 2024 Rp 2.756,45 triliun; tumbuh 12,48% (yoy)



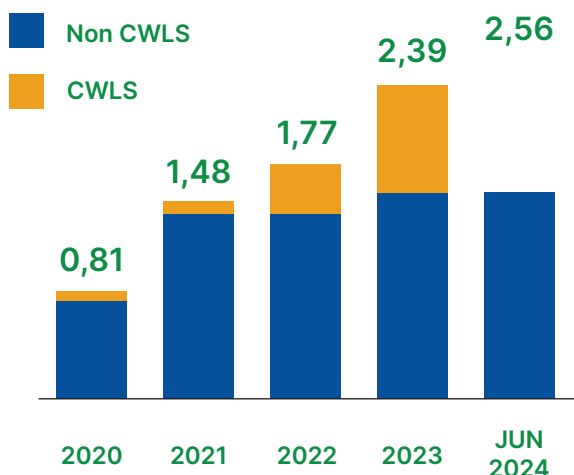
	2020	2021	2022	2023	Mar-2024	Jun-2024
Perbankan Syariah	608.89	693.80	802.26	892.17	892.97	897.11
IKNB Syariah	116,34	120,88	138,52	156,50	166,97	170,07
Pasar Modal Syariah	1,076.22	1,235.83	1,427.46	1,533.58	1,590.67	1,689.27
Growth Total Aset Keuangan Syariah (yoy, RHS)	22.70%	13.83%	15.50%	9.04%	9.52%	12.48%

³⁾ Data Ditjen PEN Kemendag, diolah ⁴⁾ OJK, tidak termasuk saham syariah

Wakaf Uang Tumbuh 212% sejak GNWU; ZIS-DSKL Tumbuh 68,28% di Q2 2024 (yoy)⁵⁾

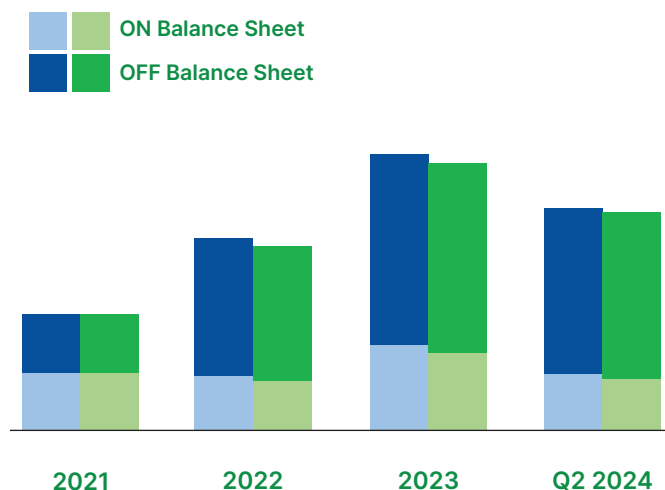
Akumulasi Aset Wakaf Uang

(Rp Triliun)

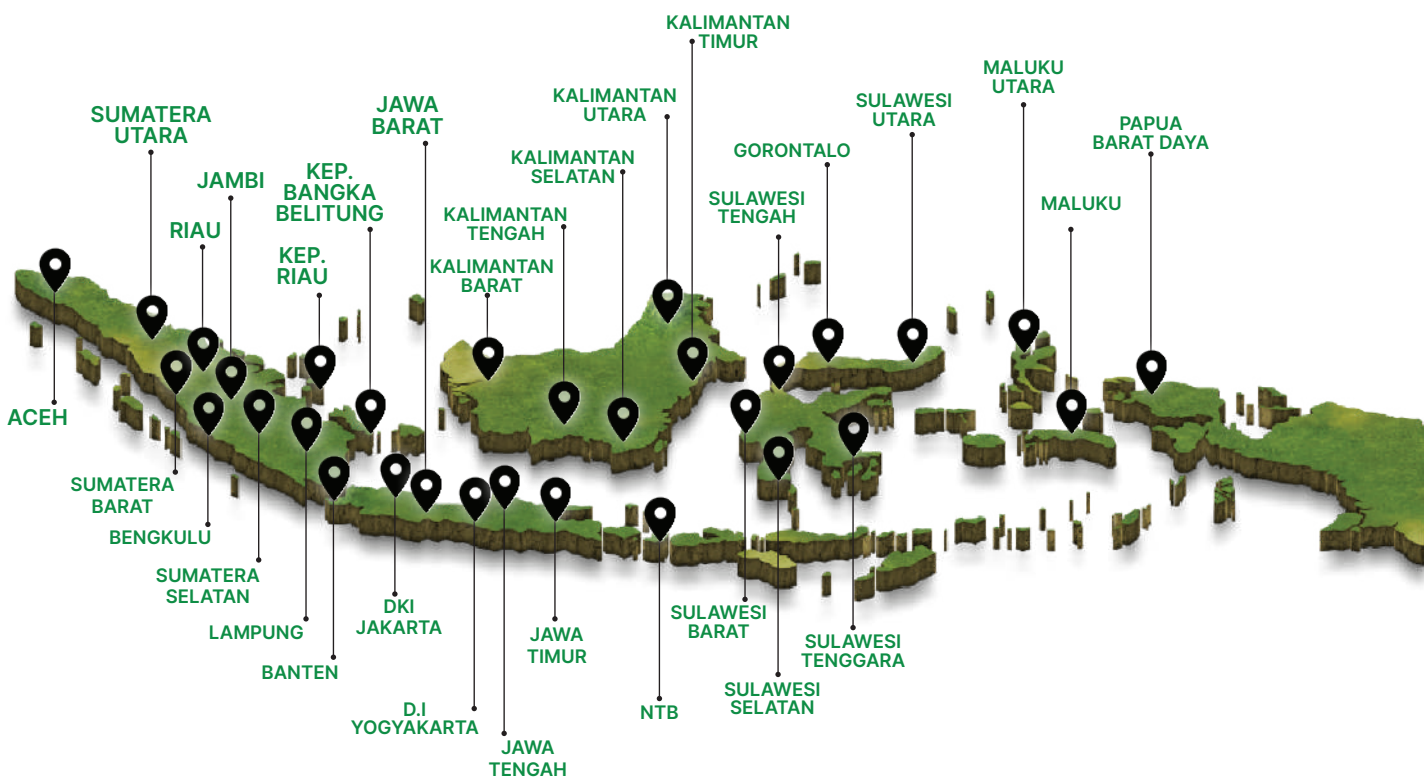


Data ZIS-DSKL Nasional

(Rp Triliun)



Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah telah terbentuk di 31 Provinsi



⁵⁾ termasuk wakaf melalui uang; Sumber: Kemenkeu, BWI & Baznas

Beberapa Tonggak Sejarah dan Kebijakan Penting Sebagai Komitmen Indonesia Mengembangkan Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Awal Pengembangan (1990-an)

1. **1992:** Berdirinya Bank Syariah Pertama

Salah satu momen penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa bunga (riba) dan dengan pembagian keuntungan (mudharabah/musyarakah). Ini merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

2. **1998:** UU Perbankan Syariah

Dalam rangka memberikan payung hukum, Indonesia mengamandemen Undang-Undang Perbankan melalui UU No. 10 Tahun 1998, yang memungkinkan operasi perbankan syariah secara lebih luas. Ini menandai komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor perbankan syariah.

Penguatan Infrastruktur dan Lembaga (2000-an)

3. **2003:** Pembentukan Unit Khusus di Bank Indonesia

Pada 2003, Bank Indonesia membentuk Direktorat Perbankan Syariah untuk memfokuskan pengembangan sektor ini. Ini menjadi awal dari penguatan regulasi dan pengawasan terhadap bank-bank syariah, serta promosi produk keuangan syariah.

4. **2008:** UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pengaturan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan bank-bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia, serta memastikan operasi mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. **2008:** Penerbitan Sukuk Negara

Indonesia menerbitkan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) pertama kali pada 2008, sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan nasional. Ini menjadi langkah besar dalam pembiayaan publik yang berbasis syariah.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah (2010-an)

6.

2014:

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Pada 2014, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang kemudian diubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2020. KNKS/KNEKS bertugas untuk merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam mendorong pengembangan sektor industri halal dan meningkatkan literasi serta akses keuangan syariah.

7.

2019-2024

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia

Pada 2019, pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Strategi utamanya meliputi:

- Memperkuat rantai nilai industri halal
- Pengembangan keuangan syariah
- Memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah
- Mendorong pendidikan dan riset di bidang ekonomi syariah

8.

2021:

Integrasi Bank Syariah

Pada tahun 2021, pemerintah menggabungkan tiga bank syariah terbesar milik BUMN (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing bank syariah nasional dan menjadikannya sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Kebijakan Strategis Lainnya

9.

Penguatan Industri Halal

Pemerintah Indonesia juga fokus pada pengembangan industri halal. Melalui kebijakan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah berusaha memastikan bahwa produk-produk Indonesia yang dipasarkan baik di dalam negeri maupun internasional mematuhi standar halal.

10.

Pengembangan Keuangan Sosial Syariah

Pemerintah juga mendorong optimalisasi keuangan sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan wakaf produktif, seperti melalui peluncuran Wakaf Linked Sukuk sebagai instrumen pembiayaan wakaf berbasis syariah.

11.

Pengembangan Fintech Syariah

Untuk mendorong inovasi, pemerintah dan regulator keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi berkembangnya financial technology (fintech) syariah. Fintech ini menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, seperti crowdfunding syariah dan pembayaran berbasis syariah, yang memperluas akses keuangan bagi masyarakat.



Kebersamaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan KDEKS pada Rapat Pleno, Oktober 2024

Foto bersama : Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024 Suharso Monoarfa (kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berfoto bersama dengan jajaran KNEKS dan perwakilan 31 KDEKS dari seluruh Indonesia pada saat Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat, Jum'at (4/10/24).

Wapres Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno KNEKS 2024 dan menjelang akhir masa tugasnya, memaparkan beberapa arahan strategis dalam menjaga keberlanjutan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, baik di tingkat nasional maupun daerah.



Diterbitkan oleh:

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda II Lantai 17
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Indonesia

